



KAJIAN ILMU PEMERINTAHAN

**PENYUSUNAN INDEKS  
GOOD GOVERNANCE  
PEMERINTAH  
KABUPATEN SIDOARJO**

TAHUN 2018

Oleh :  
Awang Darumurti, S.IP., M.Si.

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan kajian dengan judul "Kajian Ilmu Pemerintahan : Penyusunan Indeks *Good Governance* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018" guna mengetahui Indeks *Good Governance* Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.

Penulis menyadari bahwa kajian ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Surabaya, Juli 2018

Penulis

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Pada tahun 1998, telah terjadi reformasi pemerintahan yang kemudian berpengaruh pada sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan mulai melaksanakan secara maksimal prinsip desentralisasi yaitu pemberian kewenangan dan tanggungjawab kepada daerah untuk mengelola sumber daya daerah dan mensejahterakan masyarakat lokal. Pemerintah melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan undang - undang dasar 1945 dan di perkuat dengan undang - undang no 23 tahun 2014 tentang organisasi daerah. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat lebih mandiri, baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah yang sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat (Al Fino Losa, 2012). Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah dianggap lebih mengetahui dan memahami potensi dan kebutuhan daerahnya. Sehingga, kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat bisa meningkat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hirawan dalam Krismiyati (2012),

bahwa selain untuk memenuhi tujuan demokrasi, hal penting lainnya dari pemberlakuan kebijakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu daerah yang mendapatkan otonomi daerah yaitu Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya Pemkab Sidoarjo dibantu oleh perangkat daerah. Hal tersebut berlandaskan pada UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 208 ayat (1) berbunyi "Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah". Kabupaten Sidoarjo memiliki 19 dinas, 4 badan dan 18 kecamatan ( Peraturan Daerah no 11 tahun 2016 ). Masing - masing dinas dan badan memiliki unit pelaksana tugas ( UPT ). Kedudukan, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah diatur secara lengkap dalam peraturan daerah. Di dalam perda tersebut, dijelaskan secara jelas kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Namun, ternyata tidak semua OPD melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Beberapa OPD memiliki kinerja kurang baik. Dilansir dalam Sidoarjo Terkini.com ( 2018 ), sebanyak 9 OPD dan 6 kecamatan berkinerja buruk dan mendapatkan bendera hitam dari

Bupati Sidoarjo. 9 OPD tersebut diantaranya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Komunikasi dan Informatika; Bakesbangpol; Sekretariat DPRD; Dinas PUPR; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Perumahan dan Pemukiman. Untuk Kecamatan ada Kecamatan Balongbendo, Taman, Tanggulangin, Tarik, Jabon dan Tulangan. Evaluasi Kinerja tahun 2017 tersebut dilakukan oleh Bupati, Inspektorat dan BKD. Aspek yang dinilai ada 4 yaitu *Pertama* penyerapan anggaran dengan bobot penilaian 20%, *kedua* realisasi kinerja *out put* dengan bobot 40%, *ketiga* nilai SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), *keempat* penilaian Bupati terhadap kinerja pimpinan perangkat daerah ( pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan) dengan bobot 30%. Selain itu, terdapat OPD yang tersangkut kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang serta proyek pembangunan. Dana anggaran di korupsi oleh oknum tertentu ( Bhirawaonline, 2018 ).

Dari berbagai permasalahan tersebut, maka perlu diadakan evaluasi kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah. Tolak ukur yang sering digunakan untuk mengukur kinerja dari organisasi pemerintah yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip *Good Governance*. *Good Governance* merupakan suatu gagasan nilai yang didalamnya terdapat

prinsip - prinsip dan digunakan sebagai tolak ukur kinerja dari pemerintah ( Ayu, 2016 ). Menurut UNDP,terdapat 10 prinsip yang digunakan yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, evektifitas dan efisien, akuntabilitas, visi strategis, dan saling keterbukaan ( Muhammad, 2014 ). Dengan menggunakan prinsip – prinsip tersebut, kinerja pemerintah dan OPD dapat diukur dan dilihat, sehingga hasil dari pengukuran dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Pemkab Sidoarjo dan OPD.

## METODE PENELITIAN

### a. Jenis kajian

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Indeks *Good Governance* (IGG) Terhadap OPD Kabupaten Sidoarjo. Jenis data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk angka – angka dan di analisis dengan Teknik analisis kuantitatif deskriptif. hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Creswell ( 2004 ), bahwa penelitian kuantitatif deskriptif menekankan pada pengujian teori melalui proses pengukuran pada variabel – variabel dengan angka, baru kemudian dianalisis. Namun, data kualitatif juga akan disertakan dalam kajian karena dapat digunakan sebagai pelengkap data.

Metode deskriptif terfokus pada permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi atau yang bersifat aktual. Fenomena tersebut digambarkan dengan jelas dan di interpretasi secara akurat dengan Teknik analisis kualitatif dan Teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk menggali data secara mendalam, dengan metode wawancara. Sedangkan Teknik analisis kuantitatif menggunakan angka – angka untuk melihat masalah dengan teknik regresi sederhana dan determinasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggambarkan permasalahan berdasarkan pada fakta – fakta yang ada.

## b. Penentuan Populasi Dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang memiliki karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti ( Sugiyono, 2014 ). Sedangkan menurut Juliansyah Noor ( 2012 ) populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian yang menjadi sasaran penelitian.

Berdasarkan pada pendapat para ahli diatas, populasi merupakan keseluruhan obyek penelitian yang sudah memiliki karakteristik berdasarkan ketentuan peneliti. Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Sidoarjo, sebanyak 25 OPD, diantaranya :

1. Dinas Perpustakaan dan Arsip
2. Dinas Sosial
3. PPID/ KPU
4. Dinas Koperasi dan UMKM
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
6. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
7. Bappeda
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



9. Dinas Perhubungan
  10. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
  11. Dinas Perumahan dan Pemukiman
  12. Dinas Tenaga Kerja
  13. Dinas Penanaman Modal
  14. BPKAD
  15. Dinas Kominfo
  16. Dinas Pendidikan
  17. Dinas Kesehatan
  18. LPSE
  19. Kecamatan Taman
  20. Kecamatan Waru
  21. Kecamatan Wonoayu
  22. Kecamatan Tulangan
  23. Kecamatan Buduran
  24. Kecamatan Sidoarjo
  25. Masyarakat umum
2. Sampel

Sampel adalah perwakilan dari populasi yang ditentukan melalui metode tertentu. Sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili semua populasi. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah seluruh populasi. Hal ini dikarenakan jumlah populasi yang sedikit dan dibutuhkan data dari seluruh OPD.

### 3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan 3 ( tiga ) teknik pengumpulan data, yaitu :

- Wawancara

Menggali informasi kepada insforman dengan berinteraksii secara langsung atau *face to face*. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi sedalam – dalamnya.

- Kuesioner

Yaitu metode pengumpulan informasi atau data kepada informan dengan menggunakan pertanyaan serta jawaban yang sudah ditentukan. kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu responden tidak dapat menambahkan jawaban selain yang ditentukan ( Creswell, 2014 ).

- Observasi

Suatu metode peneltiian yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dan melihat secara langsung obyek yang diteliti. Data hasil pengamatan lapangan dapat digunakan untuk memperkuat data.

### 4. Teknik Pengolahan Data

- *Editing*

Tahapan dimana data yang dikumpulkan oleh kuesioner dan wawancara diolah dan dipilah sesuai dengan data yang diinginkan guna menjelaskan permasalahan.

- *Coding*

Kegiatan pemberian kode – kode pada data yang sudah dipilah. Kode – kode tersebut bertujuan untuk memberi identitas sebuah data yang akan diteliti.

- *Tabulating*

Penyajian data dalam bentuk tabel yang telah diberi kode - kode, sesuai dengan analisis yang dibutuhkan (Arikunto, 2006).

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dimana data yang sudah dikumpulkan di olah dengan menggunakan teknik analisis tertentu. Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan tabel distribusi frekuensi numerik untuk menganalisis data. data yang diperoleh disusun menurut kelas – kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Sedangkan disrtribusi frekuensi numerik adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam angka (Creswell, 2014).

Teknik analisis data ini menggunakan skala penilaian yang bersifat *semantic*, mulai dari skala sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju ( 1 sampai 4 ). Kemudian nilai tersebut akan

dihitung nilai rata – ratanya. Nilai rata – rata yang dihasilkan akan menjadi nilai Indeks penerapan *Good Governance* terhadap Organisasi Perangkat daerah ( OPD ) di Kabupaten Sidoarjo atau disebut dengan Indeks *Good Governance* ( IGG ).

Data tersebut, kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Dari tabel tersebut akan ditentukan jumlah rata – rata. Kemudian diurutkan agar diketahui nilai terkecil dan terbesarnya. Data – data tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan frekuensi jawaban yang disebut tabel distribusi frekuensi, dengan menggunakan SPSS, yaitu program komputer yang mampu memproses data statistik secara cepat dan tepat. Hasil olahan data tersebut, yang merupakan hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, disertai dengan keterangan hasil wawancara yang telah dilakukan pada saat penyebaran kuesioner.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks *Good Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Mencari Indeks setiap prinsip *Good Governance* (IPi)
  - Indeks setiap prinsip *Good Governance* (IPi) didapatkan dengan cara menjumlahkan setiap variabel masing-masing prinsip dimana,
$$i = \text{prinsip-prinsip } \textit{Good Governance}$$

- Indeks setiap prinsip *Good Governance*, menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$IP_i = \frac{\text{skor hasil hitung } i}{\text{skor ideal } i} \times 100\%$$

b. Mencari Indeks *Good Governance*

Indeks *Good Governance* merupakan agregat dari nilai indeks setiap prinsip *Good Governance* (IPi). Dalam hal ini formulasi indeks *Good Governance* dirumuskan sebagai berikut:

$$IGG = 1/8 (IP_{i1} + IP_{i2} + IP_{i3} + IP_{i4} + IP_{i5} + IP_{i6} + IP_{i7} + IP_{i8})$$

dimana:

IPi = indeks setiap prinsip GG

## STUDI KASUS

### **a. Good Governance**

Secara bahasa, *Good Governance* berasal dari bahasa Eropa yaitu *Governance*, yang kemudian didopsi menjadi bahasa Inggris menjadi *Govern* ( menyetir atau mengendalikan ) (Ayu, 2016 ). Menurut Thoha dalam Ayu ( 2016 ), *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan baik sering kali di bahas dalam ilmu politik dan ilmu administrasi. Hal ini selaras dengan lahirnya prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, dan hak asasi manusia serta pembangunan berkelanjutan. Selain itu, secara administrasi publik *Good Governance* menjadi paradigma baru yang menekankan pada sistem pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabilitas publik dan pengelolaan manajerial yang bebas korupsi.

Terdapat beberapa prinsip dalam *Good Governance*. Prinsip ini digunakan sebagai indikator dan tolak ukur untuk melihat kinerja suatu pemerintahan. UNDP ( *United Nations Development Programme* ) menyebutkan terdapat 10 prinsip *Good Governance*, yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada consensus, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, dan saling keterbukaan.

Dalam *Good Governance*, terdapat 3 elemen yang berkaitan, yaitu negara, swasta dan masyarakat. Sektor – sektor yang termasuk dalam

negara diantaranya lembaga – lembaga politik, dan lembaga sektor publik. Kemudian swasta adalah individu atau kelompok yang bekerja di sektor ekonomi dan memiliki modal. Sedangkan masyarakat adalah individu atau kelompok yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi baik formal maupun non formal ( Sedarmayanti dalam Ayu, 2016 )

*Good Governance* memiliki beberapa istilah yang perlu di definisikan dan dijelaskan. Berdasarkan pada penjelasan Ayu ( 2016 ), terdapat 3 istilah yang identik dengan *Good Governance* yaitu penerapan prinsip *Good Governance*, kinerja aparatur, dan implementasi *Good Governance*. Penerapan prinsip *Good Governance* adalah proses pengelolaan sumber daya daerah serta pengadministrasian berbagai instansi pemerintahan yang melibatkan aparatur pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan. Kinerja dari aparatur pemerintah dapat dilihat dan dinilai hasil kerjanya dengan menggunakan target pencapaian sebagai tolak ukur kinerja. Kemudian, implementasi *Good Governance* sendiri adalah pelaksanaan prinsip – prinsip *Good Governance* yaitu partisipasi, transparansi, penegakan hukum, responsive, efektifitas dan efisiensi, kesetaraan serta akuntabilitas yang baik sehingga bisa melahirkan sistem pelayanan publik seperti yang diharapkan.

## **b. Ilmu pemerintahan**

Ilmu pemerintahan yaitu salah satu ilmu yang mempelajari tentang tata kelola pemerintahan, sistem administrasi, dan kekuasaan dalam menjalankan peranannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut H.A. Brasz ( 2010 ) ,salah satu ruang lingkup kajian ilmu pemerintahan yaitu tentang cara bagaimana sistem pemerintahan dibentuk dan disusun sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku serta berfungsi dengan baik. Artinya, sistem pemerintahan yang dibentuk dan disusun tidak serta-merta didirikan. Sudah ada landasan hukum dan prosedur yang harus dipenuhi. Hal tersebut dilakukan agar memiliki pijakan yang jelas dan terarah. Sedangkan Menurut Syafie ( 2011 ), ilmu pemerintahan menjelaskan bagaimana pengurusan ( eksekutif ), pengaturan (legislatif ), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah ( baik pusat dengan daerah , rakyat dengan pemerintahnya ) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Selain itu, hubungan antar pemerintahan juga perlu diperhatikan karena dibutuhkan sinergitas dalam menenuhi kebutuhan masyarakat ( Ndraha, 2011 ).

Ilmu pemerintahan berkorelasi dengan beberapa disiplin ilmu untuk mengkaji dan melihat obyek kajian. Disiplin ilmu tersebut diantaranya ilmu politik, ilmu negara, dan ilmu filsafat. Ilmu politik memperkuat pisau analisis ilmu pemerintahan dalam sektor organisasi



politik, kebijakan publik dan proses perumusan peraturan negara. Ilmu Negara bersumbangsih pada tugas, hak dan wewenang pemerintah, tipe bentuk dan sistem pemerintahan serta fungsi dan prinsip pemerintahan. Sedangkan ilmu filsafat memperkuat analisis dalam etika pemerintah, seni memerintah dan hakekat pemerintah ( Govern, 2012 ).

Kabupaten Sidoarjo merupakan pemerintah daerah kabupaten yang mendapatkan hak otonomi daerah yaitu mengelola secara mandiri potensi daerah, administrasi, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi dari otonomi daerah tersebut yaitu optimalisasi pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai pembantu pelaksana kebijakan pemerintah daerah. Masing – masing OPD mengelola ruang lingkupnya. Selain itu, pola komunikasi antara pemkab Sidoarjo dengan OPD menjadi lebih tegas. Komunikasi atau garis koordinasinya yaitu bersifat Vertikal, yaitu unit – unit kerja yang ada berada dalam wewenang kekuasaan pemimpin, sehingga mereka harus siap memberikan apapun yang dibutuhkan oleh pemimpin, sesuai dengan peraturan ( Hasibun, 2007 ). Struktur Perangkat Daerah di kabupaten Sidoarjo diantaranya ada Bupati dan Wakil Bupati, sekretaris Daerah, DPRD, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan( Perda no 11 tahun 2016 ). Kepala daerah dan DPRD memiliki kedudukan yang sama atasu setara. Hubungan keduanya bersifat kemitraan, artinya keduanya bersinergi

dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara. Bupati harus meminta pertimbangan kepada DPRD jika hendak membuat kebijakan karena DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan penyelenggaraan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh badan, dinas, dan kecamatan untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut diatur dalam PP no 23 Tahun 2014 Tentang Perangkat Daerah, Perda Kab Sidoarjo NO 11 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan fungsi, tugas dari masing-masing OPD dipertegas dalam Peraturan Bupati. Kemudian, selama proses penyelenggaraan pemerintah akan diawasi oleh Inspektorat. Hasil dari pengawasan akan di pertanggungjawabkan secara penuh kepada Bupati.

Secara khusus, Organisasi Perangkat Daerah memiliki tugas cukup sentral, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan. Keberhasilan Pemerintah dalam menjalankan amanat otonomi daerah, ditentukan oleh kinerja dari OPD dalam mengelola pelayanan umum yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah Sidoarjo ingin menjadikan Kabupaten Sidoarjo Smart City ( JawaPos, 2017 ). Salah satu syaratnya yaitu sistem pelayanan yang berbasis online. Sistem pelayanan tersebut sudah dijalankan oleh beberapa OPD yaitu BMW ( Berkas Mlaku Dewe ) oleh Kecamatan Sukodono, Sistem pengaduan kerusakan Jalan yang disebut M-Bonk, Simanis ( Sidoarjo Material neonatal Emergency SMS

sistem dari RSUD, dimana permintaan rujukan dari puskesmas ke RSUD tinggal menggunakan SMS, DPM PTSA memiliki program SIPADU ( sistem pelayanan terpadu). Untuk OPD lain, masih dalam proses pengembangan. Sedangkan OPD lain, masih dalam penyiapan program untuk mendukung Smart City Kabupaten Sidoarjo ( JawaPos, 2017).

### **c. Bentuk hubungan pemerintah dan masyarakat**

Menurut Ndraha ( 2011 ) bentuk hubungan pemerintah dengan masyarakat seperti produsen dan konsumen. Pemerintah memproduksi kebijakan – kebijakan, program serta pelayanan publik yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk tersebut sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat akan melakukan pengawasan dan melaksanakan fungsi control terhadap produk kebijakan yang ditawarkan. Apakah yang ditawarkan pemerintah sudah sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Sarana kontrol bisa disediakan oleh pemerintah atau dari masyarakat sendiri.

### **d. Deskripsi pemerintah Sidoarjo dengan perspektif ilmu pemerintahan**

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan daerah. Kabupten Sidoarjo berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, hal ini sesuai dengan

Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola sumber daya lokal atau daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat, Kabupaten Sidoarjo mendirikan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ). Hal ini dilakukan guna proses pembagian tugas untuk mengerjakan berbagai kebijakan untuk melayani masyarakat. Menurut PP no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Salah satu fungsi dari OPD adalah pelayanan Publik.

Berdasarkan pada peraturan daerah no 11 tahun 2016 kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo memiliki 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 4 badan, 19 dinas dan 18 kecamatan. Diantaranya :

<b>Badan</b>	<b>Dinas</b>	<b>Kecamatan</b>
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Sidoarjo
Badan Pengelolaan Aset Daerah	Dinas Kesehatan	Kecamatan Candi
Badan Pelayanan Pajak Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Buduran
Badan Kepegawaian Daerah	Dinas Perumahan dan Permukiman	Kecamatan Sedati
	Satuan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Gedangan
	Dinas Sosial	Kecamatan Waru
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Kecamatan Taman

	Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana	
	Dinas Pangan dan Pertanian	Kecamatan Krian
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kecamatan Wonoayu
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kecamatan Sukodono
	Dinas Perhubungan	Kecamatan Balongbendo
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kecamatan Tarik
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kecamatan Tulangan
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kecamatan Prambon
	Dinas Kepemudaan, Keolahragaan, dan Pariwisata	Kecamatan Krembung
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kecamatan Tanggulangin
	Dinas Perikanan	Kecamatan Jabon
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kecamatan Porong
	Dinas Tenaga Kerja	

Pemerintah kabupaten Sidoarjo berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saat ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki beberapa program unggulan guna melayani masyarakat, yaitu *pertama* ada P3M ( Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat ). Pelayanan ini merupakan program dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya yaitu untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat secara terpadu. Sistem ini mensinergikan OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Masing – masing OPD memiliki operator, sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui semua OPD. *kedua* yaitu Sippadu ( Sistem Pelayanan Perizinan terpadu ). Program ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah

Kabupaten Sidoarjo untuk menciptakan sistem perizinan yang efektif, transparan dan sederhana. Kemudian, *ketiga yaitu* BMW ( Berkas Mlaku Dewe ). Sistem ini di laksanakan di kecamatan Sukodono untuk mempermudah perizinan, administrasi dan lain sebagainya serta terkoneksi dengan 19 Desa di Kecamatan Sukodono. Terakhir yaitu program Simanis dari RSUD Sidoarjo. Program ini mempermudah proses rujukan pasien dari puskesmas. Puskesmas tinggal mengirim SMS untuk mengajukan rujukan. Program pelayanan tersebut sudah berbasis online ( MetroNews, 2017 ). Sehingga wajar jika beberapa OPD tersebut mendapatkan nilai kinerja yang baik. berdasarkan pada penilaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2017, RSUD Sidoarjo berada posisi pertama sebagai perangkat daerah terbaik dengan nilai 93,44%. Sedangkan ditingkat Kecamatan, Kecamatan Sukodono menempati posisi pertama dengan nilai 88,26% (TribunNews, 2018).

Dari gambaran diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah memiliki program unggulan yang dapat memuaskan masyarakat. Masyarakat, selaku konsumen merasa cukup puas dengan produk kebijakan dan pelayanan publik yang ditawarkan. Berdasarkan penelitian Hendrik Riyandi di RSUD Sidoarjo tentang kualitas pelayanan kesehatan, menemukan bahwa masyarakat Sidoarjo cukup puas dengan pelayanan publik yang diberikan oleh RSUD Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu, penilaian masyarakat terhadap sistem pelayanan publik dari Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu di Kabupaten Sidoarjo juga dinilai baik, hal ini terlihat pada indeks kepuasan masyarakat yaitu 79,97 yang berarti mutu pelayanannya B ( Adi dan Cristiono, 2013 ).

Agar sistem pelayanan publik dari pemerintah dapat terus berkembang, maka diperlukan adanya pengawasan dan kontrol dari masyarakat Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menyiapkan program pengaduan masyarakat, yaitu Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat ( P3M ). Sistem ini bersinergi dengan semua OPD di Kabupaten Sidoarjo sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk mengadukan keluhan. Masyarakat bisa mengirim aduan via online, atau datang langsung ke OPD. Berdasarkan pada laman website P3M, [www.p3m.sidoarjokab.go.id](http://www.p3m.sidoarjokab.go.id) , tercatat sebanyak 292 aduan dari masyarakat sejak januari – Juli 2018. Hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin kritis dalam mengawasi Pemerintah. Selain itu, masyarakat juga bisa mengawasi pemerintah melalui media massa, baik online maupun cetak.

#### **e. Rekomendasi kepada pemkab Sidoarjo**

1. Pemkab sidoarjo harus meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap OPD. Sudah terjadi beberapa pelanggaran hukum dalam proses pengadaan barang dan pembangunan.
2. Memberikan pelatihan penggunaan IT yang terbaru kepada pegawai OPD untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada

mereka agar bisa memaksimalkan program smart city, terutama di tingkat kecamatan karena masih sangat minim yang sudah menerapkan sistem pelayanan berbasis online.



## PENUTUP

Sejak reformasi terjadi di Indonesia, Indonesia secara penuh mulai memberlakukan desentralisasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan wewenang dan kekuasaan kepada pemerintah daerah mengelola potensi lokal, mengatur perekonomian daerah demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu daerah tersebut yaitu kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo kini terfokus pada sistem pelayanan publik yang baik. Mereka sedang menuju *Smart City* yaitu kota pintar yang syaratnya menggunakan sistem pelayanan berbasis elektronik dan online. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab. Sidoarjo dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ). Sistem ini sudah diterapkan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ).

Namun, mayoritas OPD masih belum bisa maksimal dalam memberikan pelayanan publik berbasis elektronik dan online. Selain itu, beberapa OPD juga tersandung masalah pelanggaran hukum. Maka dari itu, dibutuhkan tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari OPD. Tolak ukur yang digunakan yaitu prinsip – Prinsip *Good Governance*. Dengan menggunakan prinsip –prinsip *Good Governance*, permasalahan pada OPD dapat diidentifikasi dan bisa digunakan sebagai bahan evaluasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT.RinekaCipta.

Creswell John.W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: PustakaPelajar

Govern, Sumardi. 2012. *PengantarI lmu Pemerintahan*. Jurnal tidak dipublikasikan. Surabaya

<http://jatim.metrotvnews.com/peristiwa/5b2jEAb-tiga-inovasi-pelayanan-publik-berbasis-online-unggulan-sidoarjo>

<http://surabaya.tribunnews.com/2018/03/12/inilah-daftar-16-instansi-pemerintahan-di-sidoarjo-yang-kinerjanya-dianggap-moncer>

Krimiyati Tasrin dan Putri Wulandari. 2012. *Kajian Pengaruh Kebijakan Desentralisasi pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Kasus : Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal dipublikasikan. Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Lembaga Administrasi Negara :"Jurnal Borneo Administrator, Volume 8 No. 2 Tahun 2012

Losa, Al Fino. 2012. *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera barat*. Sumatera Barat

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*.  
Jakarta: RinekaCipta

M. Adi Mei S dan Cristiono Utomo. *Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal dipublikasikan. MMT-ITS

Nawawi, Juanda. 2009. *Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal dipublikasikan. E- jurnal Government :  
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 Januari 2009

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology( Ilmu Pemerintahan Baru )*.  
Jakarta : Rineka Cipta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.  
Bandung: Alfabeta

Rosyada, Ayu Amrina. 2016. *Analisis penrapan prinsip good governance dalam rangka pelayanan public di badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Samarinda*. Jurnal dipublikasikan. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan, volume 4, Nomor 1, 2016 hal 2477-2831 Undang – undang no 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

<http://harianbhirawa.com/2018/04/polda-jatim-pastikan-pengusutan-dugaan-korupsi-dindik-sidoarjo/>

<http://sidoarjoterkini.com/2018/03/12/9-opd-dan-6-kecamatan-berkinerja-buruk-dihadiahi-bendera-hitam/>

Riyandi, Hendrik. 2014. *Kualitas Pelayanan Kesehatan ( Studi Deskriptif Tentang Pelayanan Publik Bagi Penerima Jamkesmas di RSUD Sidoarjo*. Jurnal dipublikasikan. Administrasi Negara, Universitas Airlangga.

Kebijakan dan manajemen Publik Volume 1, Nomor 1, Januari 2014

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT Refika Aditama